

EVALUASI TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA WISATA PETULU MELALUI PERSEPSI MASYARAKAT

Pande Putu Wulandari¹, I Gusti Made Dwi Candra Anggara²

^{1,2}Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya

Jl. Kubu Gn., Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, 80361

e-mail: 1putu.wulandari@triatmamulya.ac.id, 2candra.anggara@triatmamulya.ac.id

Abstract

This research aims to analyze community perceptions of the government's role in the sustainable development of the Petulu Tourism Village, so that relevant stakeholders obtain reflection in order to build a joint consensus. The study of community perceptions is substantial because it aims to evaluate the phenomenon of tourism development in the region and review community actions. This research was designed with a qualitative approach and an interview guide was used as a data collection instrument. Interview activities involving key informants from government elements, community leaders and selected informants in three banjars, namely Petulu Gunung, Nagi and Petulu Desa, as well as non-participant observations were carried out. The research results show that the public perceives positively the role of government as a regulator, facilitator, catalyst and innovator. However, the government's role as a facilitator in efforts to improve technical and managerial competence through training and development activities for the community still needs to be improved.

Keywords: Petulu Tourism Village, community perception, government's role

Pendahuluan

Penelitian dilatarbelakangi oleh fenomena minimnya pengembangan Desa Wisata Petulu. Performa kawawan pusat Desa Wisata Petulu yakni DTW Burung Kokokan, belum menunjukkan resultan yang signifikan dan mengarah pada penurunan dalam beberapa tahun belakangan, bahkan diproyeksi akan ditinggalkan oleh wisatawan (Mahadewi dan Sudana, 2017). Padahal, habitat burung kokokan (*Bulbucus ibis*) di desa ini merupakan satu satunya di Bali, dan Badan Pengelola Objek Wisata Burung Kokokan (BPOWBK) telah dirintis dan dikelola oleh masyarakat asli setempat. Selain itu, meskipun telah dikembangkan sejak satu dasawarsa lalu, tepatnya tahun 2011, dan pendanaan untuk mengembangkan desa wisata, salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembangunan penangkaran khusus burung kokokan di utara desa, nyatanya belum dapat difungsikan seperti yang direncanakan. Maka dari itu, partisipasi antar pemangku kepentingan, termasuk kepemimpinan politik yang kuat, untuk mengimplementasikan partisipasi yang holistik, merupakan faktor esensial dalam keberlanjutan pariwisata (Ruhanen 2013; Mertha, 2015). Mertha (2015) menambahkan bahwa, *forward-looking policies* dalam mengelola destinasi wisata agar berkelanjutan, adalah suatu ihwal yang dapat membangun hubungan harmonis antara pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat lokal. Pemerintah wajib meyakinkan bahwa masyarakat lokal terlibat dalam pengambilan keputusan, serta mendukung kebijakan agar tujuan pembangunan tercapai (Yi dan Bill, 2012).

Petrevska (2012) menegaskan bahwa bagian fundamental dari peran aktif pemerintah dalam pembangunan pariwisata adalah menetapkan kerangka umum pada regulasi pariwisata. Proses perencanaan yang memadai dan efisien, disesuaikan dengan kondisi lokal, serta pengelolaan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, menjadi hal yang esensial dalam regulasi tersebut (Vieira *et al*, 2016). Sesungguhnya, Pemerintah Daerah Gianyar telah merencanakan tindak penataan lingkungan permukiman tradisional Kawasan Ubud, yang dicatat dalam

Arahan Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang Kabupaten Gianyar. Pada rencana peruntukan lahan makro, Desa Petulu dirancang sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah dan wisata lingkungan, dengan konsep konservasi dan pelestarian pola fisik kawasan desa.

Berdasarkan kompleksitas yang dialami Desa Wisata Petulu, maka diperlukan suatu kajian untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu. Hal ini memiliki urgensi untuk diteliti agar para pemangku kepentingan terkait, dalam hal ini pemerintah, memperoleh retropeksi dalam memformulasikan kebijakan. Kajian mengenai persepsi masyarakat juga menjadi hal yang substansial karena bertujuan untuk mengevaluasi fenomena pengembangan kepariwisataan dan meninjau tindakan masyarakat. Meskipun persepsi masyarakat bersifat dinamis, namun dengan meninjau persepsinya maka akan dapat menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Daerah yang berbeda dengan karakteristik masyarakat tertentu, maka akan berdampak pada hasil yang berbeda pula. Selain itu, memandang bahwa masyarakat merupakan subjek yang bersinggungan dengan dampak atas aktivitas pariwisata yang terjadi di daerahnya.

Penelitian ini pun dinilai penting dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian tentang Desa Wisata Petulu dan aspek kepariwisatannya belum banyak ditemukan. Sejumlah penelitian yang dijumpai di antaranya menyinggung tentang hubungan antara masyarakat dengan investor, alih fungsi lahan, potensi wisata, ekowisata, hingga motivasi wisatawan (Arida dkk, 2014; Florencia dkk, 2016; Mahadewi dan Sudana, 2017; Suprpta dan Mahagangga, 2017; Lindari, 2018; Handayani dkk, 2021; Krisnadewi, 2021; Sari dan Sri, 2021). Dengan demikian, maka penelitian ini mengkaji Desa Wisata Petulu dari perspektif yang berbeda. Manfaatnya, dengan adanya refleksi melalui penelitian ini, maka pemerintah daerah dapat memainkan perannya secara optimal, sehingga secara bersamaan menstimulasi partisipasi masyarakat dan berimplikasi terhadap pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu.

Landasan Konsep

Dalam persepsi manusia, terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan, yang mempersepsikan sesuatu itu positif maupun negatif, dan akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak (Sugihartono dkk, 2007). Murphy (1985) menyebutkan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat di antaranya, jenis interaksi antara wisatawan dan masyarakat, tingkat ketergantungan individu pada industri, dan tingkat perkembangan pariwisata. Disamping itu, penelitian lainnya telah menyajikan faktor yang lebih spesifik, seperti jarak tempat tinggal individu dari sentra pariwisata (Belisle dan Hoy, 1980); partisipasi dalam organisasi lokal (Teye *et al*, 2002); ketergantungan ekonomi pada industri pariwisata (Madrigal, 1993); hubungan dengan pemerintah (Alrwajfah *et al*, 2019), dan sebagainya. Vigoda, et al (2010) menyoroti secara khusus bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi hal yang substansial, karena berhubungan dengan tingkat kepuasan, evaluasi dan pengembangan sikap yang positif.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat substansial dalam mengembangkan tindakan yang bertujuan untuk menjamin pariwisata semakin berkelanjutan, dengan menimbang bahwa diskusi tentang kebijakan terkait sumber daya yang dimanfaatkan, dikembangkan secara lokal (Brokaj, 2014). Birkland (2010) mengemukakan pemerintah memiliki dua peran dalam aktivitas pembangunan kepariwisataan, yakni (1) kebijakan fasilitatif, yaitu pemerintah berperan sebagai fasilitator, dalam hal memberikan dukungan berupa dana, barang, dan peningkatan jasa yang diperlukan; (2) kebijakan regulasi, yaitu pemerintah sebagai regulator yang bertindak sebagai pemberi kebijakan untuk membatasi dan sebaliknya memaksa jenis perilaku tertentu. Selain itu, Siagian (2009:142) mengemukakan bahwa pemerintah memainkan peranan di antaranya sebagai inovator dan katalisator. Selaku inovator, pemerintah memiliki peran dalam mencetuskan hal-hal baru, seperti inovasi dalam

menciptakan prosedur, cara berpikir baru yang bersifat *problem solving* dan *action oriented*, serta lain sebagainya. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah dapat mengenali faktor positif agar dapat bermanfaat dan mengendalikan faktor negatif sehingga dampaknya dapat diminimalkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali yang dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan berbagai fenomena dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Petulu. Permasalahan pada penelitian ini dijawab dengan menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur, observasi non-partisipan dan studi kepustakaan. Analisis deskriptif kualitatif serta triangulasi data yang diterapkan pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap peran pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu. Secara deskriptif kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian-uraian naratif yang dilakukan dengan menampilkan data yang diperoleh, serta memaparkan dan memberi makna terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga rumusan masalah dapat terjawab dan tujuan penelitian tercapai.

Informan kunci yang terlibat di antaranya, kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar; Ketua BUMDes Bersama Gianyar Aman; Pemerintah Desa Petulu; Ketua BUMDes Petulu dan Pokdarwis; kepala dan anggota BPOWBK; serta *kelian dinas Banjar* Petulu Gunung. Selain itu, dilibatkan sejumlah 84 orang masyarakat di tiga *banjar* yakni Petulu Gunung, Petulu Desa dan Nagi yang terpilih di lapangan, dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Masyarakat asli di *banjar* tersebut dipilih karena tempat tinggalnya berdampingan dengan DTW Burung Kokokan, sehingga dinilai dapat mendeskripsikan perkembangan pariwisata di sekitarnya. Persepsi masyarakat disebut bersifat positif, apabila respon (pendapat atau tindakan) terhadap objek tersebut adalah menandakan persetujuan. Sementara itu, sebuah persepsi disebut negatif, jika respon terhadap suatu objek menandakan penolakan.

Hasil dan Pembahasan

Pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat memiliki peran di semua sektor pembangunan baik sebagai perencana, pengambil keputusan, investor, pelaksana, pengelola, pengawas maupun evaluator. Akan tetapi, meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada faktor masyarakat sebagai pelaku utama, peran lainya seperti swasta dan pemerintah masih diperlukan. Birkland (2010), Siagian (2009:142), Pitana dan Gayatri dalam Hasanah dan Maani (2019) mengemukakan pemerintah memiliki berbagai peran dalam aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan kepariwisataan, yakni regulator, fasilitator, inovator dan katalisator.

Peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dan menetap di daerah tujuan wisata. Untuk meninjau dan mengevaluasi peran pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan yang terjadi di wilayahnya, kajian mengenai persepsi masyarakat menjadi hal yang substansial. Selain itu, sebagai “tuan rumah” yang merasakan dampak atas pembangunan pariwisata di daerahnya, persepsi masyarakat berkaitan dengan dukungan yang diberikan kepada pemerintah untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan selanjutnya. Hal ini pun sangat membantu dalam memberikan informasi tentang perubahan persepsi atau sudut pandang masyarakat lokal seiring dengan berjalannya perkembangan pariwisata di daerah mereka (Arcana, 2016).

Dalam kasus Desa Wisata Petulu, pengembangannya harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang dapat diukur melalui persepsi masyarakat sebagai sebuah kegiatan evaluatif. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan

kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat.

a) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah wajib mengintegrasikan kebijakan dengan mengadopsi dan mengimplementasikan agenda keberlanjutan (van der Walldt, 2016). Agenda keberlanjutan tersebut termaktub pada Perda Kab. Gianyar No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 Pasal 51 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa, Kawasan Pariwisata Ubud seluas kurang lebih 7.712 Ha, salah satunya terdiri atas wilayah Petulu seluas 233 Ha. RTRW tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kenyamanan, dan keamanan dari pelayanan kawasan pusat pemerintahan desa, pusat perdagangan, pusat industri kreatif dan daya tarik wisata, salah satunya DTW Burung Kokokan di Desa Petulu.



Gambar 1. Habitat Burung Kokokan di Banjar Petulu Gunung

Selain kawasan, pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki kebijakan lain dalam pengembangan kepariwisataan, salah satu desa wisata. Desa Petulu ditetapkan sebagai desa wisata di Kabupaten Gianyar bersamaan dengan Desa Tegallalang, Buahian Kaja, Lebih, Keramas, Sidan, Lodtunduh, Singapadu, Celuk dan Desa Pejeng Kangin. Penetapan ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya mendorong pariwisata berbasis masyarakat. Desa wisata juga dipandang sebagai cara tercepat dan termudah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa, karena mengandalkan aset alam dan budaya yang tersedia. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mendorong terbentuknya kemitraan antara pihak-pihak terkait (*stakeholder*).

Berbagai regulasi yang ditetapkan merupakan landasan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menetapkan desa wisata di lingkungan Kabupaten Gianyar, diantaranya Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar hingga Peraturan Bupati Gianyar Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Gianyar. Mekanisme verifikasi diaplikasikan dalam menetapkan kelayakan suatu desa menjadi desa wisata melalui penciptaan parameter untuk melakukan penilaian terhadap calon desa wisata. Pada Bab III disebutkan mengenai Tata Cara Penetapan Desa Wisata, yang proses pengajuannya bersifat *bottom-up* yakni dari desa itu sendiri. Sebelum dewan verifikator melakukan penilaian ke suatu desa, desa tersebut harus mengisi dan memenuhi berkas yang diperlukan. Putrawan menyebutkan bahwa: Apabila kita (pemerintah) yang menunjuk atau secara *top-down*, maka akan sulit dalam pengembangan desa tersebut secara berkelanjutan, karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang diinginkan oleh desa tersebut. Apabila sebuah desa memandang desa wisata sebagai suatu kebutuhan dan prioritas, mungkin dari bapak *perbekel* (kepala desa) yang membuat suatu program dalam

perencanaan APBDes-nya, tentunya hal tersebut akan menjadi sesuatu yang positif dan kita (pemerintah) akan menyambutnya” (Wawancara Anak Agung Gde Putrawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar)

Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan Desa Wisata Petulu cenderung dipersepsikan positif oleh masyarakat yang memiliki latar belakang atau berkecimpung di pariwisata. Sementara itu, masyarakat lainnya menilai bahwa penetapan ini secara umum tidak berpengaruh secara langsung dalam aktivitas sehari-harinya. Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan Oka, Kasi Pemerintahan Desa Petulu yang menyatakan bahwa secara umum, masyarakat tidak ada yang menolak pengembangan desa wisata. Sementara itu, masyarakat yang bergerak di industri pariwisata mendukung penuh penetapan desa wisata. Di sisi lain, masyarakat umum rasanya memandang bahwa penetapan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupannya.” (Wawancara dengan Cokorda Gede Oka, Kasi Pemerintahan Desa Petulu)

Berdasarkan hal tersebut pula, petunjuk dalam mengatur kegiatan pengembangan desa wisata dirasakan manfaatnya secara langsung oleh tokoh-tokoh penggerak atau pelopor, dan tidak langsung oleh masyarakat umum, karena mereka dapat mengembangkan Desa Wisata Petulu dengan mengelola sumber daya sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Sebelum ditetapkan menjadi desa wisata, masyarakat bahkan diberikan pendampingan hingga proses penetapan tiba, sehingga proses perencanaan tersebut muncul dari masyarakat, disiapkan dan melibatkan masyarakat serta didukung oleh pemerintah selaku regulator.

Tosun (2005) menegaskan, organisasi lokal non-pemerintah dan badan lokal terpilih harus diberdayakan agar pembangunan partisipasi masyarakat dapat berlanjut. Hal ini juga tidak terlepas dari eksistensi pelopor-pelopor di desa wisata. Pelopor ini disebut juga sebagai *local champion*. Terminologi *local champion* dikatakan sebagai *a new community-based leadership development*, walaupun pada kenyataannya telah tumbuh dan berdampak pada implementasi CBT.

b) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan dukungan berupa dana, barang, dan peningkatan jasa yang diperlukan pada sebuah destinasi. Dengan kata lain, pemerintah menyediakan segala fasilitas yang mendukung program pengembangan pariwisata. Anstrand dalam Suganda (2018) menekankan, dalam implementasi konsep pariwisata berkelanjutan, pengembangan kapasitas masyarakat dan lingkungan menjadi hal penting yang semestinya diperhatikan terlebih dahulu, sementara aspek ekonomi akan menjadi *induced impact*.

Putrawan menyebutkan bahwa sejumlah pelatihan telah dirancang dan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Tiga pelatihan yang telah terlaksana di antaranya kebersihan, pemandu wisata, dan pengelolaan *homestay*. Menu-menu pelatihan yang belum terlaksana adalah peningkatan kapasitas tata kelola kualitas pelayanan keselamatan, keamanan dan kesehatan (K3) di destinasi wisata; tata kelola destinasi wisata dan desa wisata; pelatihan digitalisasi (*branding*, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, *homestay*, kuliner, cinderamata, fotografi); pembuatan konten promosi multimedia dan sistem informasi termasuk konten peta wisata dan brosur untuk *tourist information center*.

Namun demikian, peran pemerintah sebagai fasilitator khususnya dalam memberikan kompetensi terhadap SDM, baik itu melalui pelatihan, sosialisasi dan pengembangan lainnya, masih dipandang kurang atau belum cukup oleh masyarakat setempat. Indikasi yang muncul adalah, hanya segelintir masyarakat yang memperoleh akses untuk peningkatan kapasitas SDM dalam mengembangkan desa wisata, sementara masyarakat lain, tidak. Dalem, dkk (2019) menyebutkan, nampaknya peningkatan SDM yang menguasai tentang burung kokokan, perlu digalakkan sehingga pemanduan yang diberikan kualitasnya lebih meningkat. Pemandu wisata lokal dan penjaga tiket masuk di DTW Burung Kokokan hanya belajar bahasa Inggris

saat mengenyam pendidikan di sekolah, dan belum memperoleh pelatihan bahasa Inggris lanjutan, seperti *english for specific purpose*.

Di sisi lain, masyarakat mempersepsikan positif mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator dalam hal memberikan bantuan dana untuk pengembangan Desa Wisata Petulu pada umumnya dan DTW Burung Kokokan pada khususnya. Hal yang disoroti oleh masyarakat terutama peran pemerintah sebagai fasilitator dalam hal perencanaan kawasan Desa Wisata Petulu termasuk pembangunan penangkaran, hutan buatan, lahan parkir, wantilan, gapura, pos tiket dan amenitas fisik lainnya. Selain itu, terdapat rencana penataan trotoar di sepanjang DTW Burung Kokokan, serta penataan pepohonan di sepanjang jalan Banjar Petulu Gunung. Selain untuk sarang kokokan, melainkan juga menambah unsur estetika. Kemudian, penataan terhadap titik-titik lokasi untuk mengamati burung kokokan; penangkaran burung kokokan; lokasi atau tempat parkir kendaraan dan aspek aksesibilitas lainnya.



Gambar 2. Lahan Parkir di Bagian Utara Desa Petulu

Penataan kawasan Desa Wisata Petulu khususnya DTW Burung Kokokan secara holistik dengan mengedepankan aset alam dan budaya yang dimiliki masyarakat, juga telah dicanangkan dengan anggaran dana dan terdiri atas tiga termin, meskipun realisasinya baru terlaksana sebanyak 30 persen dari keseluruhan rencana. Selain itu, pembangunan Desa Wisata Petulu tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa melalui APBDes. Sumber dari APBDes adalah anggaran dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, hingga dana anggaran khusus. Pemerintah desa dapat pula mengajukan proposal, baik pendanaan maupun pemberdayaan masyarakat kepada OPD terkait.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana tersebut. Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan dengan mengaplikasikan kombinasi pendekatan secara *bottom up* dan *top down*, baik dari program pemerintah, maupun permohonan dari masyarakat. Pelatihan dan pemberdayaan mengenai ekonomi masyarakat diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk pembentukan, pembinaan serta pemberdayaan BUMDes dan desa wisata. BUMDes merupakan “rumah” bagi unit usaha yang ada di desa, dua di antaranya unit desa wisata dan warung desa. Dengan kata lain, BUMDes yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pendapatan desa dari unit-unit usaha tersebut, sementara Pokdarwis adalah pelaksana pengelolaan desa wisata.

c) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Katalisator

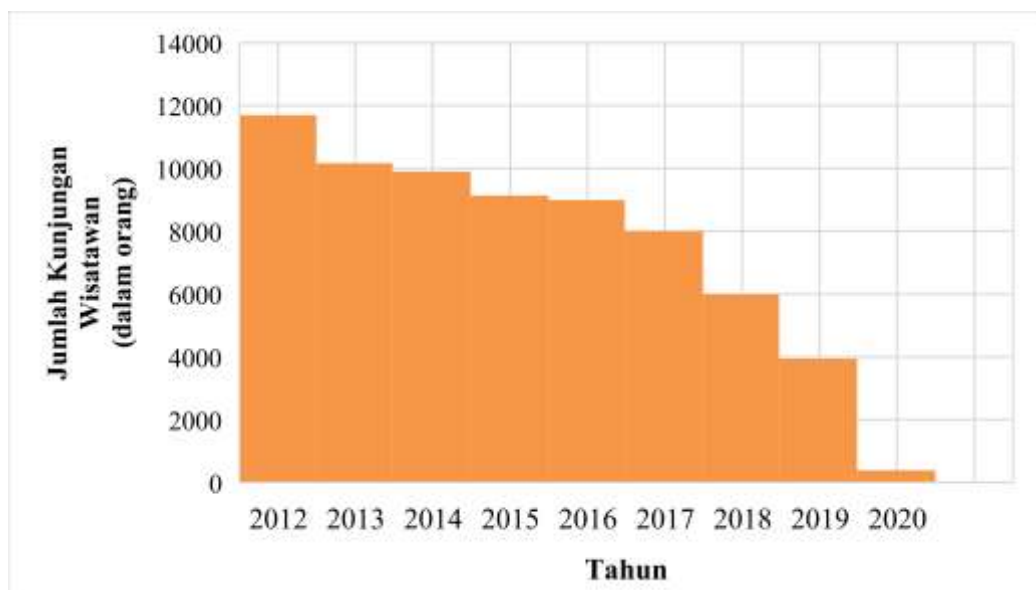
Peran pemerintah sebagai katalisator menurut Siagian (2009:142) adalah pemerintah berperan untuk mengendalikan faktor negatif agar dampaknya dapat diminimalkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah dapat merancang perencanaan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya, serta

mendorong pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, sehingga dapat menarik manfaat positif dan mendorong laju pembangunan.

Justifikasi Zakia (2021) yang menyebutkan masyarakat setempat terkadang dianggap sebagai objek tanpa terlibat secara aktif dalam proses ekonomi, nampaknya tidak terjadi di Desa Wisata Petulu. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan DTW Burung Kokokan sebagai pusat dari Desa Wisata Petulu yang muncul dari prakarsa dan swadaya masyarakat termasuk *local champion* yang membentuk BPOWBK, kemudian diiringi dukungan oleh pemerintah. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu wadah desa wisata dan pengelolaannya di bawah naungan BUMDes. Partisipasi yang timbul ditengah-tengah masyarakat Petulu bukan partisipasi paksaan oleh pemerintah, melainkan datang dari masyarakat. Pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga penerimaan manfaat disesuaikan dengan karakteristik masyarakat.

Masyarakat mempersepsikan bahwa dampak ekonomi atas pengembangan pariwisata di Desa Petulu merupakan dampak yang paling dirasakan. Masyarakat secara umum meyakini perlunya pelestarian burung, dan menyatakan pengembangan ekowisata berbasis burung memberikan manfaat bagi mereka, antara lain untuk sumber pendapatan, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Beriringan dengan hal tersebut, pengelolaan DTW Burung Kokokan pun berangsur membaik, dari yang sebelumnya tidak ditetapkan tiket masuk dan pengelolaannya yang masih belum tertata, serta belum akuratnya pencatatan wisatawan yang berkunjung ke DTW Burung Kokokan, hingga kini menghasilkan belasan sampai puluhan juta rupiah per bulannya sehingga masyarakat Banjar Petulu Gunung memperoleh berbagai manfaat.

Pada pertengahan Juli 2011, jumlah kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata Burung Kokokan mulai tercatat secara akurat. Pada tahun tersebut, jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 7.126 orang. Akan tetapi, belum terdapat catatan resmi mengenai komposisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke Daya Tarik Wisata Burung Kokokan. Namun diperkirakan jumlah wisatawan domestik lebih banyak daripada wisatawan mancanegara, khususnya saat musim burung kokokan berkembangbiak. Hal tersebut disebabkan oleh musim libur wisatawan domestik yang bertepatan dengan musim berkembangbiaknya burung kokokan, yakni di bulan Desember.



Gambar 3. Grafik Kunjungan Wisatawan ke DTW Burung Kokokan

Berdasarkan Gambar 3, jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Burung Kokokan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hingga akhirnya pandemi COVID-19 melanda dan tidak ada pencatatan kunjungan dalam beberapa tahun terakhir ini. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan presentase sebesar 90 persen. Rata-rata jumlah kunjungan wisatawan perbulan dalam lima tahun pertama yakni 2012 hingga 2016, berkisar 700 orang dan berangsur-angsur menurun dengan rerata perbulannya 200-400 orang dalam empat tahun selanjutnya.

Pengelola berpandangan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya persaingan dengan DTW lain, pergeseran minat atau permintaan wisatawan, hingga menurunnya jumlah pemandu wisata atau agen perjalanan yang memasarkan serta mengakomodasi wisatawan untuk mengunjungi DTW Burung Kokokan. Faktor alam serta tingkah laku burung kokokan menjadi satu diantara sekian penyebab menurunnya jumlah wisatawan serta pemandu wisata dan agen perjalanan yang memasarkan DTW Burung Kokokan. Hal ini disebutkan pula oleh Butler dalam Dwipayana, dkk (2018) bahwa, perubahan jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif berkaitan dengan dinamika destinasi dan perubahan selera wisatawan sebagai konsumen.

Peran pemerintah sebagai katalisator dalam menghadapi problematika tersebut yakni mencanangkan sebuah program untuk mengevaluasi ke-32 desa wisata yang telah ditetapkan sejak tahun 2017. Tujuannya, untuk mengetahui posisi dari desa-desa wisata tersebut, baik rintisan, berkembang maupun maju bahkan stagnan. Hal ini diungkapkan oleh Putrawan, sebagai berikut.

“... ini yang akan kami evaluasi karena banyak desa wisata yang telah ditetapkan seolah-olah mati suri. Sebenarnya potensi yang dimiliki apabila berbicara soal Petulu adalah kokokan, sekarang, bagaimana mengintegrasikan agar wisatawan yang berkunjung tidak hanya melihat kokokan. ... Ketika berbicara soal desa wisata, sesungguhnya adalah daya tarik yang terintegrasi antara akomodasi, restoran atau kuliner, dan ekonomi kreatif” (Wawancara Anak Agung Gde Putrawan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar).



Gambar 4. Bale Banjar Petulu Gunung

Sementara itu, dampak sosial budaya yang dipersepsikan positif oleh masyarakat Petulu ini tercermin dalam berbagai kegiatan sosial budaya yang tetap berlangsung dan disokong dengan manfaat atas pengembangan DTW Burung Kokokan pada khususnya dan Desa Wisata Petulu pada umumnya. Pendapatan dari tiket masuk DTW Burung Kokokan, digunakan untuk mengembangkan infrastruktur sosial, salah satunya bale Banjar Petulu Gunung dan dibelanjakan sebidang tanah. Tujuannya untuk memperluas bale banjar sebagai satu titik untuk mengamati burung kokokan; sebagai tempat menjajakan cinderamata khas Desa Petulu; serta diperuntukkan sebagai tempat kegiatan sosial budaya masyarakat lainnya. Lokasi bale banjar sangat strategis, apabila wisatawan menghadap timur, maka akan dapat mengamati burung

kokokan. Sementara itu, apabila menghadap ke arah barat, wisatawan dapat melihat areal persawahan masyarakat Petulu.

Kondusifnya lingkungan di Banjar Petulu Gunung bagi burung kokokan dapat dilihat dari populasinya yang tampak meningkat, meskipun jumlah pohon bunut telah berkurang dan digantikan dengan pohon lainnya. Penanaman pohon kembali bersumber dari hasil dari retribusi tiket masuk; kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR); sumbangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dana Desa Petulu; hingga perguruan tinggi. Sudira mengungkapkan bahwa saat musim berkembangbiak, antara bulan Oktober sampai Maret, hampir lebih dari 10.000 burung bersarang di wilayah Banjar Petulu Gunung. Meskipun belum terdapat catatan akurat mengenai populasi burung kokokan yang bersarang di Desa Petulu, namun masyarakat tidak mempersepsikan buruk mengenai keberlanjutan populasinya. Hal ini semakin diperkuat dengan *awig-awig*, seperti dilarang menembak dan penyelamatan burung kokokan yang hanya diperbolehkan bagi masyarakat Petulu. Kondusifnya lingkungan di DTW Burung Kokokan juga merupakan dampak atas aturan tentang pembatasan bangunan dan suara. Namun hal ini secara tidak langsung membatasi peluang masyarakat untuk menjalankan bisnis berskala besar. Akibatnya Banjar Petulu Gunung tidak memiliki akomodasi berbintang, namun dapat dijumpai pada Banjar Nagi dan Kutuh.

d) Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pemerintah sebagai Inovator

Sebagai innovator, pemerintah berperan dalam menciptakan hal-hal baru, seperti inovasi untuk mencetuskan prosedur hingga cara berpikir baru yang dapat memecahkan masalah dan berorientasi pada aksi nyata (Siagian, 2009:142). Dalam kasus Desa Wisata Petulu, khususnya DTW Burung Kokokan, ide-ide dalam pengembangannya cenderung timbul dari masyarakat Petulu dan pemerintah mengakomodasinya dalam bentuk dukungan fisik maupun non-fisik, beberapa di antaranya adalah pembangunan penangkaran dan amenitas wisata lainnya, pemberian pelatihan, giat reboisasi, penataan kawasan, termasuk dalam penetapan Desa Wisata Petulu. Ide penangkaran tersebut muncul dari masyarakat Petulu yang mengenali dan paham akan aset alam yang dimilikinya, serta ingin berinovasi untuk mengembangkan produk dan memberikan pengalaman terbaik kepada wisatawan. Pemerintah kemudian memberikan suntikan dana dan dukungan moril kepada masyarakat untuk mewujudkannya dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat, meskipun belum dapat dikelola secara maksimal.

Lebih lampau, masyarakat Petulu yang sebelumnya belum memandang burung kokokan sebagai aset pariwisata yang dapat “dikomersialkan” dan memberi manfaat dalam kehidupannya dan lingkungannya, kemudian dapat mengelolanya sebagai daya tarik wisata karena melihat berbagai pemandu wisata acapkali membawa wisatawan untuk melakukan aktivitas *bird watching* di Desa Petulu. Manfaat yang lebih besar kemudian diperoleh masyarakat Petulu, khususnya Banjar Petulu Gunung dalam perjalanannya mengelola DTW Burung Kokokan. Hal ini tidak terlepas dari aksi nyata pemerintah yang dipersepsikan positif oleh masyarakat dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan DTW Burung Kokokan, salah satu yang mendasar adalah gapura dan pos tiket masuk.

Serupa halnya dengan penetapan desa wisata yang idenya muncul dari masyarakat Petulu, agar kepariwisataan di desanya dirasakan lebih luas dan memberi manfaat secara holistik, serta citra Desa Petulu dapat dikenal sebagai desa wisata. Ide ini kemudian diakomodasi oleh pemerintah melalui penetapan Desa Petulu sebagai desa wisata. Pada saat pemerintah melakukan proses verifikasi terhadap calon desa wisata, disinilah perannya sebagai inovator muncul. Pemerintah melakukan pendampingan dari sebelum suatu desa ditetapkan hingga menjadi desa wisata. Ketika itu, pemerintah melihat motif partisipasi sekaligus komitmen masyarakat dalam mengembangkan dan mempersiapkan desanya sebagai desa wisata.

Hal ini digarisbawahi pula oleh Kencana dan Mertha (2014) bahwa, agar partisipasi masyarakat berdampak optimal, perlu dipahami motif di balik partisipasi. Shoji *et al* (2010) menambahkan, terdapat dua alasan dalam memahami motif partisipasi. Pertama adalah implikasi kebijakan, artinya partisipasi masyarakat tidak dapat diturunkan, kecuali motifnya diketahui. Kedua, memahami “biaya partisipasi” bagi masyarakat, terutama masyarakat dengan kelangkaan sumber daya seperti keterampilan dan waktu untuk berpartisipasi. Hal ini pun menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menetapkan desa wisata.

Apabila calon desa wisata tidak dapat memenuhi skor dan dewan verifikator belum menyetujuinya setelah berbagai diskusi dan pertimbangan, maka penetapannya akan ditunda. Kemudian, pemerintah akan memberikan dukungan dan saran agar desa tersebut berbenah untuk memenuhi aspek-aspek penilaian yang juga menandakan motif dan komitmen masyarakat, sekaligus mengindikasikan keberlanjutan pembangunan desa wisata tersebut. Apabila masyarakat telah dapat memenuhi penilaian dewan verifikator, maka desanya akan ditetapkan menjadi desa wisata di Kabupaten Gianyar. Pemerintah memberikan inovasi lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah desa wisata, dua di antaranya pendanaan yang terbatas dan SDM yang kurang kompeten. Program kedepannya juga, pemerintah akan senantiasa mendorong desa-desa untuk mendirikan BUMDes dan menggali potensi desanya masing-masing yang dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi tersebut baik alam, budaya dan ekonomi kreatif. Hal ini digarisbawahi oleh Ngurah Adi, sebagai berikut.

“Kami memberikan dorongan kepada pemerintah desa untuk memajukan BUMDes, apabila BUMDes itu maju, silahkan dana desanya dimanfaatkan untuk penyertaan. Kami juga mendorong untuk pengembangan potensi desa, menjadi daya tarik dan desa wisata”(Wawancara Dewa Ngakan Ngurah Adi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar).

Simpulan dan Saran

Peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan Desa Wisata Petulu, meliputi regulator, fasilitator, katalisator dan inovator, yang dipersepsikan pula oleh masyarakat Petulu, diteliti pada penelitian ini. Persepsi terhadap peran pemerintah sebagai regulator dinilai positif oleh masyarakat, diikuti oleh peran sebagai fasilitator dalam hal pendanaan, termasuk pembangunan fisik kawasan, dan peran sebagai katalisator dalam mendorong pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Proses perencanaan desa wisata melibatkan masyarakat serta didukung oleh pemerintah selaku regulator, fasilitator bahkan inovator. Sebagai regulator dan katalisator, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan yang mengatur tentang pengembangan Desa Petulu, termasuk petunjuk dalam pemanfaatan sumber daya serta pemetaan kawasan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, peran pemerintah sebagai fasilitator, yakni dalam hal meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial masih perlu ditingkatkan. Pemerintah disarankan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada masyarakat Petulu secara lebih intensif. Tujuannya, agar pengembangan desa wisata dapat terarah, dibimbing sesuai dengan aset dan keaktifan lokalnya, serta meningkatkan mutu SDM pengelola desa wisata. Tidak hanya pemerintah, masyarakat disarankan untuk melakukan sinkronisasi antar tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat lainnya dalam mengembangkan ide atau gagasan produk wisata lain, selain DTW Burung Kokokan. Selain itu, masyarakat diharapkan agar dapat membangun desanya secara lebih swadaya, berkomitmen, menyeluruh dan gotong royong hingga melibatkan kegiatan evaluasi yang holistik harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alrwajfah, M. M., F. Almeida-Garcia, dan R. Cortés-Macías. 2019. Residents' Perceptions and Satisfaction toward Tourism Development: A Case Study of Petra Region, Jordan. *Sustainability*, Vol. 11.
- Arcana, K. T. P. 2016. Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Perkembangan Akomodasi Pariwisata, Studi Kasus: Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali. *Analisis Pariwisata*, Vol. 16, No. 1, 52-60.
- Arida, I. N. S., M. Baiquni, J. Damanik, dan H. S. Ahimsa-Putra. 2014. Dinamika Ekowisata Tri Ning Tri di Bali Problematika dan Strategi Pengembangan Tiga Tipe Ekowisata Bali. *Kawistara*, Vol. 4, No. 2, 111-124
- Birkland. 2010. *An Introduction to The Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making: Fourth Edition*. M.E. Sharpe.
- Brokaj, R. 2014. Local Government's Role in The Sustainable Tourism Development of A Destination. *European Scientific Journal (ESI)*, Vol. 10, No. 31.
- Dwipayana, N. P., E. N. Kencana, dan N. K. T. Tastrawati. 2018. Memodelkan Dampak dan Keberlanjutan Pariwisata Pesisir di Kabupaten Badung-Provinsi Bali. *E-Jurnal Matematika*, Vol. 7, No. 2, 111-121.
- Hasanah, N. dan K. D. Maani. 2019. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Padang. *Journal of Residu*, Vol. 3, No. 20, 109-115.
- Kencana, I. P. E. N. dan I. W. Mertha. 2014. People Participation as Social Capital Form for Realizing Sustainable Ecotourism. *International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering*, Vol. 8, No. 10, 3014-3020
- Krisnadewi, N. K. 2021. Karakteristik dan Motivasi Wisatawan Minat Khusus yang Berkunjung ke Desa Wisata Petulu dan Tegallalang (*tesis*). Universitas Udayana.
- Lindari, P. C., N. N. Subadiyasa, dan I. M. Mega. 2018. Monitoring Perubahan Lahan Sawah dan Alih Kepemilikan Lahan di Kecamatan Ubud Berbasis Remote Sensing dan GIS. *E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika*, Vol. 7, No. 2, 254-263.
- Madrigal, R. 1993. A Tale of Tourism in Two Cities. *Annals of Tourism Research*, Vol. 20, 336-353.
- Mahadewi, N. P. E., dan I. P. Sudana. 2017. Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. *Jurnal Analisis Pariwisata (JAP)*, Vol. 17, No. 1.
- Mertha, I. W. 2015. Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Destinasi Pariwisata Berkualitas (*disertasi*). Universitas Udayana.
- Murphy, P. E. 1985. *Tourism: A Community Approach*. London: Methuen.
- Petrevska, B. 2012. The Role of Government in Planning Tourism Development in Macedonia. *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, Vol. 5, No. 3.
- Ruhanen, L. 2013. Local Government: Facilitator or Inhibitor of Sustainable Tourism Development? *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 21, No. 1, 80-98.
- Sari, N. P. R., dan A. A. P. Sri. 2017. Perkembangan Usaha Villa, Homestay dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal di Desa Petulu Ubud Bali. Seminar Nasional Sains dan Teknologi IV (Senastek IV) Bali 14-15 Desember 2017.
- Shoji, M., K. Aoyagi, R. Kasahara, dan Y. Sawada. 2010. Motives Behind Community Participation: Evidence from Natural and Field Experiments in a Developing Country. Working Paper No. 16. Tokyo: JICA Research Institute.
- Siagian, S. P. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suganda, A. D. 2018. Konsep Wisata Berbasis Masyarakat. *A Research Journal on Islamic Economics*, Vol. 4, No.1, 29-41.
- Sugihartono, F. K. N., F. Harahap, F. A. Setiawati, dan S. R. Nurhayati. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.

- Suprpta, I. K. A. G., dan I. G. A. O. Mahagangga. 2017. Relasi Antara Investor Pariwisata dengan Masyarakat Lokal Di Desa Pakraman Laplapan Desa Petulu Kecamatan Ubud. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 5, No. 1, 51-55.
- Teye, V., S. F. Sönmez, dan E. Sirakaya. 2002. Residents' Attitudes Toward Tourism Development. *Annals of Tourism Research*, Vol. 29, 668–688.
- Tosun, C. 2005. Stages in The Emergence of a Participatory Tourism Development Approach in The Developing World. *Geoforum*, Vol. 36, 333-352.
- Van der Waladt, G. 2016. The Role of Government in Sustainable Development: Towards a Conceptual and Analytical Framework for Scientific Inquiry. *Administratio Publica*, Vol. 24, No. 2, 49-72.
- Vieira, I., A. Rodrigues, D. Fernandes, dan C. Pires. 2016. The Role of Local Government Management of Tourism in Fostering Residents' Support to Sustainable Tourism Development: Evidence from a Portuguese Historic Town. *International Journal Tourism Policy*, Vol. 6, No. 2, 109-135.
- Vigoda-Gadot, E. A. Shoham, dan D. R. Vashdi. 2010. Bridging Bureaucracy and democracy in Europe: A Comparative Study of Perceived Managerial Excellence, Satisfaction with Public Services, and Trust in Governance. *European Union Politics*, Vol. 11, 289-308.
- Yi, W. dan Bill. 2012. Heritage Protection and Tourism Development Priorities in Hangzhou, China: A Political Economy and Governance Perspective. *Tourism Management Journal*, Vol. 33, 988–998.
- Zakia. 2021. Ecotourism in Indonesia: Local Community Involvement and The Affecting Factors. *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 8, No. 2, 93-105.